

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Agustino. Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Asyhadie Zaeni, (2008). *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Rajawali Pers
- Atmaja, J. R. (2018). *Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus*. Bandung: Rosda
- Bertrand, L., Caradec, V., & Eideliman, J. S. (2014). *Situating disability. The recognition of disabled workers in France*. *Alter*, 8(4), 269–281. <https://doi.org/10.1016/j.alter.2014.09.006>
- Budi Winarno. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Dewi, U. (2015). Implementasi Kebijakan Kuota Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Mendapatkan Pekerjaan Di Kota Yogyakarta. In *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara* (Vol. 67). <https://kemsos.go.id/2015>
- Dwiyanto, Agus. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta: UGM Press
- Ellinger, A. E., Naidoo, J., Ellinger, A. D., Filips, K., & Herrin, G. D. (2020). *Applying blue ocean strategy to hire and assimilate workers with disabilities into distribution centers*. *Business Horizons*, 63(3), 339–350. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2020.01.009>
- Geniofam, (2010). *Mengasuh mensukseskan dan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Gerai Ilmu.
- International Labour Organization. (2001). *Mempromosikan Pekerjaan Layak bagi Semua Orang Membuka Kesempatan Pelatihan dan Kerja bagi Penyandang Disabilitas* Dirujuk dari [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_160360.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_160360.pdf)
- International Labour Organization. (2013). *Hak atas Pekerjaan yang Layak bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta : Kantor Perburuhan Internasional-ILO
- Islamy, M. Irfan. (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kim, S., & Rhee, S. (2018). *Measuring the effects of employment protection policies: Theory and evidence from the Americans with Disabilities Act*. *Labour Economics*, 54, 116–134. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2018.08.001>
- Kustini, E., & Dianti, R. (2020). *Pemenuhan Hak Aparatur Sipil Negara (ASN) Penyandang Disabilitas di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*. *Jurnal Ilmiah Manajemen FORKAMMA*, 4(1), 24–36.

- Lestari, E. Y., & Sumarto, S. (2021). *Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang disabilitas di Kota Semarang* (Vol. 33).
- Mithout, Anne-Lise. 2021. *Dari Akses Yang Sama Ke Pekerjaan Hingga Peluang Karir Yang Sama ? Praktik Kerja Dan Pengalaman Kerja Pekerja Penyandang Disabilitas Yang Memenuhi Syarat Di Jepang*. <https://doi.org/10.1016/j.alter.2021.07.001>
- Moleong, Lexy J (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Moleong, Lexy J. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant Dwijodijoto. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- Purwati, D. A. (2020). *Kewajiban Pemenuhan Kuota Pekerja Penyandang Disabilitas Di Perusahaan BUMN*. *Jurist-Diction*, 3(3), 921. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18630>
- Ratna, Dessy Grestika dan Kismartini. *Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Di Kota Semarang (Implementasi Perda Jawa Tengah No. 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas)*. Departemen ilmu administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Richard, Sarah & Sophie Hennekam. (2020) *Membangun Identitas Positif Sebagai Pekerja Penyandang Cacat Melalui Perbandingan Sosial: Peran Stigma Dan Cacat Karakteristik*. *Journal of Kejuruan Perilaku* 125 (2021) 103528. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2020.103528>
- Rusli, Harijan (2003). *Hukum Ketenagakerjaan*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Rusli, Harijan. (2011), *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Cet 2, Ghalia Indonesia: Bogor.
- Shaleh, I. (2018). *Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 63–82. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9829>
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Suharno. (2009). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis Kebijakan*. Yogyakarta : UNY Press.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik*. Pekanbaru : Alaf Riau
- Tangkilisan.(2003). *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI.

Wardah, S. (2019). *Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Di BUMN*.

Widjaja, A. H., Wijayanti, W., & Yulistiyaputri, R. (2020). *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan*. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 197. <https://doi.org/10.31078/jk1719>

Richard, M. (2018, Oktober 30). Baru 1% Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

Tobing, A. G. (2021, 06 08). Wujudkan Kesamaan Hak, Pemprov DKI Percepat Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. DKI Jakarta, Indonesia.

## **PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia* ( Lembaran

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.( Lembaran Negara nomor 33 Tambahan Lembaran Negara No.4279)

Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang *Disabilitas* ( Lembaran Tahun 2016 No 69, Tambahan Lembaran Negara No 5871

(Konvensi Hak penyandang disabilitas (*The Convention on the Rights of persons with Disabilities*);

Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 1998 tentang *Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat*;

Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2015 tentang *Pengupahan* (Lembaran Negara Nomor 237, Tambahan lembaran Negara Nomor 5474)

Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Disabilitas.

Perpres No. 36 Tahun 2020 Tentang *pengembangan kompetensi kerja*

Undang-Undang No. 19 tahun 2011 tentang *pengesahan konvensi mengenai hak penyandang Disabilitas*.

UU No. 4 Tahun 1997 tentang *Penyandang Cacat*,